

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro menjadi salah satu tulang punggung menaikkan sistem perekonomian di Indonesia. Ini karena usaha kecil ini punya peranan yang berdampak besar. Salah satunya UMKM yang menjadi salah satu kegiatan yang membuka lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, UMKM sangat berdampak besar dalam mewujudkan stabilitas nasional yang merata di Indonesia.

Dikatakan sebagai usaha kecil apabila usaha itu mampu berdiri sendiri, tidak dibantu dan tidak berasal dari anak perusahaan. Biasanya berbentuk perseroan yang punya badan hukum, ataupun tidak punya. Dalam tetapan yang ada, usaha itu harus atas nama warga negara Indonesia yang kekayaannya maksimal mencapai Rp. 200.000.000

Ada beberapa masalah yang mengganggu pengembangan untuk memperluas usaha UMKM, yaitu terbatasnya SDM, rendahnya SDM, sarana yang terbatas, juga prasarana teknologi yang sedikit. Yang disebutkan menjadi faktor pendukung. Sedangkan faktor utamanya ialah kurangnya modal yang ada untuk pembiayaan yang seharusnya. Bagi perusahaan, modal menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan terganggunya usaha yang akan dijalankan apabila modal **kerjanya** tidak mencukupi. Dan jika **modalnya tidak tercukupi**, kualitas dan

Jika ditanya alasan, karena UMKM mampu bersaing dalam mendirikan lapangan kerja yang mengurangi pengangguran dan menstabilkan perekonomian Indonesia.

Pada Tahun 2010, data yang dilihat dari Kementerian dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan tentang besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 56% dan peningkatan tenaga kerja yang dilakukan diatas 97%. Ini terjadi dalam sekor UMKM. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian membaik karena adanya dorongan dan campur tangan dari UMKM. Pajak yang akan diterima sebagiannya tetap didominasi oleh usaha yang besar.

Hasil pajak dari nonmigas diketahui sebesar Rp 445,7 triliun dan Nilai pajak yang di tambah mencapai target Rp 336,1 triliun yang dihasilkan dari perolehan usaha besar dan dicatat dalam APBN tahun 2012. Padahal dalam realita yang sebenarnya, lebih besar penyumbangan UMKM yang mampu memperoleh capaian 53 juta unit, berbeda halnya dengan usaha besar yang hanya 4.800 unit. Begitu juga dengan sumbangan PBD 56% dari usaha kecil dan 43% dari usaha besar. UMKN juga menciptakan lapangan kerja dengan 99,4 juta tenaga kerja.

Lain dari itu, usaha yang besar hanya mampu mempekerjakan 2,8 juta pekerja. Hal lainnya yang terjadi pada UMKM yaitu dari 53 juta yang dihasilkan, hanya 25% (13 juta orang) yang aksesnya dibolehkan ke lembaga keuangan. Ini sungguh disayangkan jika dibandingkan dengan banyaknya campur tangan

UMKM yang begitu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk terus makmur dan jauh dari kehilangan pekerjaan. (<http://www.depkop.go.id>)

Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat di pandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Suryadharna ali (2015) menyatakan bahwa UMKM merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional sehingga bila sektor tersebut terabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia.

Jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah atau lembaga terkait. Adapun jumlah unit UMKM di Indonesia disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah UMKM (unit)	Pangsa (%)	Jumlah usaha besar (unit)	Pangsa (%)
2014	51.409.612	99,99	4.650	0,01
2015	52.764.750	99,99	4.676	0,01
2016	54.114.821	99,99	5.150	0,01
2017	55.206.444	99,99	4.952	0,01
2018	56.534.592	99,99	4.968	0,01

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada akhir tahun 2018 terdapat 56.534.592 UMKM dari seluruh usaha di Indonesia.jumlah tersebut meningkat cukup banyak dari tahun 2014 yang berjumlah 51.409.612 unit. Bahkan menunjukkan bahwa jumlah UMKM menempati 99,9% dari keseluruhan usaha di Indonesia dan usaha-usaha besar hanya 0,01%. Dengan banyaknya UMKM, maka semakin banyak pula akan tercipta lapangan pekerjaan.

Kontribusi lainnya yang diberikan oleh UMKM dalam pengembangan ekonomi di Indonesia adalah kontribusi UMKM terhadap PDB nasional dari tahun 2014-2018 yang lebih besar di bandingkan dengan Usaha Besar (UB). Pada tahun 2018 kontribusi UMKM yakni 59,08% lebih besar dari kontribusi usaha besar hanya 40,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM berperan cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagaimana dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Kontribusi UMKM terhadap PDB.

Tahun	UMKM (%)	Usaha Besar (%)
2014	55,67	44,33
2015	56,18	43,82
2016	56,22	43,78
2017	58,05	41,95
2018	59,08	40,92

Sumber: *Kementrian Koperasi dan UKM RI*

Jadi dengan adanya Bank Muamalat yang menjadi pelopor bank syariah di Indonesia dan ditanggung jawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat menguntungkan masyarakat yang butuh modal untuk mengembangkan bisnisnya, terutama para pengusaha UMKM. Persaingan yang terjadi antara syariah dan konvensional menjadi hal yang bisa dipantau, walau dalam segi apapun tetap syariah lebih banyak keunggulan pada nasabah yang akan memakainya.

Lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan dan simpanana. Lebih dikenal dengan nama financing dan funding. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Muhammad (1998:170) seorang calon nasabah akan lebih selektif dalam menjatuhkan pilihannya, apabila hal yang diinginkannya dijanjikan oleh satu lembaga syariah, maka calon nasabah akan mencaritahu dan mulai terpicat dengan faktor serta produk apa saja yang akan diterimanya jika menjadi nasabah lembaga itu.

Kualitas pelayanan dalam usaha perbankan memiliki daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk menentukan pilihannya terhadap suatu bank (Adlani 2010:2). Calon nasabah secara umum memilih bank untuk menabung tentu yang dapat memberikan kemudahan dan keuntungan. Tentu setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan melakukan pembiayaan atau menabung. Selain itu juga customer atau nasabah memperhatikan kemudahan prosedur dari produk yang di tawarkan sehingga ~~nasabah~~ termotivasi untuk menggunakannya. Nasabah akan ~~mempertimbangkan~~ faktor tersebut untuk mencar ~~kepuasan~~ dalam menyimpan

dananya di bank, karena bagaimanapun konsumen pasti akan mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannya (Maski 2010:44).

Nasabah selalu menginginkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan menuntut bank untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu faktor tersebut merupakan salah satu hal yang mempengaruhi minat dari nasabah. Maka hal tersebut sangat di butuhkan dalam menghadapi persaingan, dari pandangan diatas sudah semestinya bank melihat dan selalu berorientasi pada nasabah agar dapat memanfaatkan peluang yang ada, sehingga bank dapat terus tumbuh (Ahdi 2009:2).

Menurut Fred Selnes (1993) bahwa pada industri dan jasa nama (merk) lebih sering dihubungkan dengan reputasi perusahaan daripada produk atau jasa itu sendiri (Adlani 2010:3). Karena itu salah satu pertimbangan nasabah dalam menabung dibank adalah reputasi perbankan tersebut dimata nasabahnya, karena reputasi merupakan salah satu faktor bagi nasabah untuk mempercayakan uangnya ditabung atau diinvestasikan kepada bank tersebut (Adlani 2010:4).

Selain itu juga ada faktor prosedur yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah yang akan melakukan pembiayaan yang diajukan kepada perbankan syariah dan tingkat margin yang diberikan juga menjadi pertimbangan bagi nasabah itu sendiri. Oleh karena itu prosedur pembiayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk pembiayaan, apabila pelayanan yang di berikan itu memuaskan dan prosedur pembiayaan yang mudah dilakukan

maka akan menarik minat nasabah untuk memilih pembiayaan di perbankan syariah (Mockijat 1990:435).

Dan berikut adalah tabel dimana pembiayaan di perbankan syariah masih jauh dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah:

Tabel 1.3 Perbandingan Total Pembiayaan Perbankansyariah dan Konvensional.

Tahun	Bank syariah	Bank konvensional
2014	25.698	1.553.074
2015	17.495	1.781.889
2016	11.396	2.004.722
2017	11.237	2.399.043
2018	10.210	2.699.854

Sumber : www.ojk.go.id

Dari sini bisa kita lihat bahwa UMKM masih berada dalam minat yang kecil dalam melakukan pengembangan usaha dan pengajuan biaya pinjamayang terdaftar di satu lembaga syariah. Ini dikarenakan adanya faktor yang dibuktikan mampu membawa pengaruh yang besar. Dan pada hasil penelitian yang duludulu diketahui bahwa banyak faktor yang terbukti mempengaruhi minat UMKM dalam memutuskan melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengetas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomer satu penggerak bagi pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Perkembangan UMKM yang baik akan membawa kemajuan bagi ekonomi suatu Negara.

Dalam upaya menumbuhkan ekonomi rakyat, mengurangi pengangguran dan pemerataan pendapatan pemerintah harus bekerja sama dengan perbankan syariah supaya bisa mewujudkan hal tersebut. Pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertanian bertujuan untuk meningkatkan usaha UMKM di setiap kecamatan dan kelurahan.

Berikut adalah data UMKM di kota Yogyakarta hingga tahun 2018:

Tabel 1.4 Data Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kasifikasi		
		Mikro	Kecil	Menengah
1	Kotagede	505	47	2
2	Kraton	199	10	1
3	Mantrijeron	152	12	1
4	Mergangsan	171	42	6
5	Tegalrejo	251	43	2
6	Umbulharjo	431	63	10
7	Wirobrajan	113	21	2
Jumlah		1822	238	24

Sumber : <http://umkm.jogjakota.go.id>

Dari data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 1822 Usaha Mikro dan 238 Usaha Kecil dan 24 usaha menengah

Tabel 1.5 Data sektor UMKM di Kecamatan Umbulharjo

No	Sektor	Jumlah
1	Kerajinan dan Umum	112
2	Kimia dan Bahan Bangunan	39
3	Logam dan Elektronika	101
4	Pengelolaan Pangan	191
5	Sandang dan Kulit	51
	Jumlah	494

Sumber : <http://umkm.jogjakota.go.id>

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik dalam menganalisis apa-apa saja yang menjadi faktor dalam mempengaruhi minat UMKM dalam melakukan pengajuan biaya diperbankan syariah dengan judul: **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT UMKM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (STUDY KASUS DI KEC. UMBULHARJO D.I. YOGYAKARTA)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, bisa dirumuskan masalah apa saja yang terjadi, yaitu:

1. Apakah faktor pelayanan berpengaruh positif terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah?

2. Apakah faktor reputasi berpengaruh positif terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan terhadap perbankan syariah?
3. Apakah faktor prosedur berpengaruh positif terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah?
4. Apakah faktor pelayanan, reputasi dan prosedur berpengaruh positif secara simultan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan terhadap perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh secara parsial faktor pelayanan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan terhadap perbankan syariah
2. Menganalisis pengaruh secara parsial faktor reputasi terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan terhadap perbankan syariah
3. Menganalisis pengaruh secara parsial faktor prosedur terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan terhadap perbankan syariah
4. Menganalisis pengaruh secara simultan faktor pelayanan, reputasi dan prosedur terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi perbankan syariah

Untuk memastikan adanya tambahan untuk bahan evaluasi pemeriksaan kinerja manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan minat UMKM dalam melakukan pembiayaan.

2. Bagi mahasiswa

Mampu memanfaatkan kondisi yang ada dengan teori yang digunakan untuk mengembangkan khazanah di bidang ilmu ekonomi.